

“AKU” DALAM PANCASILA (REFLEKSI METAFISIKA PANCASILA)

**oleh
Supriyono Purwosaputro***

ABSTRAK

Makna “aku” dalam kaitan dengan Pancasila, lebih tepat mengarah pada “aku ontologis” dan “aku fungsional”. Dikarenakan Pancasila bukan merupakan rangkaian maupun kesatuan rumusan sila-sila yang bersifat mitik, melainkan merupakan rumusan yang rasional dan objektif berdasarkan keadaan dan historisitas bangsa Indonesia. Dengan “aku ontologis” berarti tiap-tiap subjek manusia Indonesia memiliki kesadaran pemikiran mengenai kehadiran dirinya dalam negara yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila, dan akar budaya bangsanya. Keberadaan Pancasila itu sendiri sesungguhnya tidak terlepas dari keberadaan “aku” subjek manusia Indonesia, karena terkait langsung dengan persoalan implementasi Pancasila pada kehidupan manusia Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan reflektif ini adalah dengan menempatkan esensi dan eksistensi manusia yang memiliki kesadaran penuh sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dengan itu manusia merasa tak mungkin ada tanpa peran Penciptaan Tuhan, karenanya Tuhan menjadi prinsip pertama dari segala yang ada (termasuk Pancasila). Hal demikian kemudian dijadikan pijakan melakukan pemikiran reflektif metafisis tentang Pancasila

Eksistensi aku-manusia Indonesia pada aku dalam Pancasila, berada dalam bentuk humanisme yang integral yang menempatkan relasi aku-manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia dan dengan Tuhannya secara serasi, selaras dan seimbang. Disini Pancasila menempatkan manusia Indonesia sebagai “subjek monopluralis” (tunggal tapi jamak). Aku dalam Pancasila dan sekaligus pula Pancasila dalam eksistensiku, secara ontologis telah memposisikan Pancasila sebagai “simbol hidup” yang mengarahkan dan menggerakkan situasi dan kondisi eksistensi manusia Indonesia sebagai subjek yang monopluralis. Pancasila sebagai simbol hidup yang dianggap “melepaskan” manusia Indonesia dari situasi-situasi batas yang melingkupi eksistensinya. Pancasila sebagai simbol hidup memerlukan penjabaran pada tataran kategori operasional yang nilai-nilainya tidak terlepas dari nilai-nilai dasarnya yang bersifat imanen. Konsekuensi logis implementasinya bahwa manusia Indonesia sebagai makhluk monopluralis dengan segala potensi internal maupun eksternalnya, harus berupaya terus menerus menggali nilai-nilai implementatif dari nilai-nilai dasar ontologis Pancasila, sehingga Pancasila tidak dirasakan semakin kabur dan kering dari kehidupan sehari-hari masyarakat manusia Indonesia.

Kata kunci : aku, manusia monopluralis, refleksi, Pancasila

A. PENDAHULUAN

Pemahaman Pancasila secara mendasar dan mendalam nampaknya hanya bisa dilakukan pendekatan metafisika. Sebab metafisika dalam tradisi pemikiran filsafat dianggap sebagai “filsafat dasar” sekaligus dianggap “dasar filsafat” (lihat Sontag, 1974). Disamping itu, metafisika

sering ditempatkan sebagai “filsafat pertama” karena memberikan dasar-dasar bagi cabang-cabang filsafat yang lain, namun sebaliknya metafisika juga sering diposisikan sebagai “filsafat terakhir” karena metafisika mencoba merangkum seluruh cabang kefilosofan menjadi satu visi yang lebih utuh, komprehensif (Joko Siswanto dan Reno Wikandaru, 2013: ix).

“Aku” Dalam Pancasila (Refleksi Metafisika Pancasila)

Diskursus filosofis-metafisis tentang Pancasila dalam rangka memperoleh pemahaman yang radikal dan holistik, dirasa cukup penting dilakukan untuk menggali prinsip-prinsip pertama yang mendasari nilai-nilai dari Pancasila. Hasil pembahasan secara metafisik dapat menjadi landasan pokok bagi upaya penjelasan implementatif Pancasila yang lebih mendasar dan memadai, lebih dari yang telah dilakukan oleh ilmu-ilmu empiris.

Keberadaan Pancasila itu sendiri sesungguhnya tidak terlepas dari keberadaan “aku” subjek manusia Indonesia, karenanya dalam kaitannya dengan persoalan implementasi Pancasila pada kehidupan manusia Indonesia, perlu dilakukan kajian secara seksama mengenai relasi “aku” manusia Indonesia dengan Pancasila itu sendiri. Persoalan dimaksud antara lain, apa dan/atau siapa “aku” itu ? Bagaimana posisi “aku” dalam relasi dengan Pancasila ? Apa dan/atau bagaimana realitas dari Pancasila itu sendiri ?

Manusia sebagai pendukung ontologis pancasila pada hakikatnya adalah *monopluralis*, oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai *dasar antropologis* Pancasila. Subjek pendukung pokok sila-sila pancasila adalah manusia, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia (Notonagoro, 1975: 23).

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak yaitu terdiri atas *susunan kodrat*, *raga* dan *jiwa* jasmani dan rohani, *sifat kodrat* manusia adalah sebagai *makhluk individu* dan *makhluk sosial*, serta kedudukan kodrat manusia sebagai *makhluk pribadi berdiri sendiri* dan sebagai *makhluk Tuhan Yang Maha Esa*. Oleh karena kedudukan kodrat manusia dan sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan inilah maka secara hierarkis sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa* mendasari dan menjiwai keempat sila-sila pancasila yang lainnya (Notonagoro, 1975: 53).

Manusia Indonesia melakukan refleksi metafisik terhadap Pancasila, karena hanya manusialah yang mampu membuat refleksi atas Pancasila tersebut. Disamping itu, manusia Indonesia merupakan “*aku pendukung dan pengemban*” nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian hanya manusialah yang ber-Pancasila. Dengan melakukan refleksi implementatif metafisik atas Pancasila, manusia akan mampu menjadi “*aku yang ber-Pancasila*” dan mampu pula “*menghadirkan Pancasila ke dalam akunya*”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian khas filsafat. Metode dalam penulisan adalah dengan metode deskriptif-analitis serta menggunakan metode hermeneutik, kemudian dilakukan pencarian data-data yang paling relevan dan utama terkait dengan kajian tentang

Pancasila dilakukan analisis yang lebih tajam sehingga menghasilkan gagasan baru atau penafsiran baru tentang Pancasila.

C. HASIL PENELITIAN

1. Pendekatan Metafisika atas Pancasila

Pendekatan dalam bermetafisika mengenai Pancasila yang dilakukan oleh para filsuf senantiasa berangkat dari pijakan reflektif tertentu. Setiap filsuf mempunyai dasar berpijak dalam merekonstruksikan ide-ide yang terdapat dalam realitas tentang Pancasila. Setiap filsuf mulai berfikir dengan menempatkan diri pada situasi tertentu dan pada titik historis tertentu. Metafisika tidak berangkat dari sesuatu yang *ex-nihilo*, melainkan memulai dengan ide sentral yang menjadi dasar untuk membangun sistem filsafatnya. Notonagoro, misalnya menggunakan pijakan dasar ontologi Aristotelian, yaitu teori *Causa*. Driyarkara dalam merefleksi metafisik mengenai Pancasila berpijak pada pendekatan antropologi metafisik.

Notonagoro dalam pijakan ontologi Aristotelian berusaha menjelaskan asal mula Pancasila dengan menggunakan teori *causa*. Aristoteles mengemukakan empat macam *causa* yaitu: *causa material*, *causa formal*, *causa efisiensi* dan *causa finalis*. Keempat *causa* tersebut merupakan cara yang mendasar untuk memahami segala sesuatu, sehingga melalui cara kerja empat *causa* tersebut dapat dipelajari fungsi dan tujuan semua metafisika (Frederick Sontag, 1970: 48).

Teori *causa* dari Aristoteles di atas diambil oleh Notonagoro dalam membahas Pancasila secara metafisik. Hasil refleksi metafisik Notonagoro tentang Pancasila tersebut, disarikan berikut ini,

Pertama: bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan (*causa materialis*) terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya

Kedua: Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu Bung Karno yang kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi pembentuk atau bangun (*causa formalis*) dan asal mula tujuan (*causa finalis*) dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara.

Ketiga: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai asal mula karya (*causa efisien*) yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Sebelum ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia baru ada Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara (Notonagoro, 1980, 32-33).

Lebih lanjut Notonagoro menempatkan uraian tentang **Tuhan** sebagai *causa prima* dengan bertolak pada pendekatan Aristotelian. Tuhan sebagai *causa prima* mengandung sifat hakikat yaitu yang pertama-tama. Jadi selama-lamanya ada atau abadi, hanya ada satu, asal mula dari segala sesuatu, dari padanya tergantung segala sesuatu, jadi sempurna kuasa. (Notonagoro, 1980:76-77). Konteks pemikiran ini senada dengan pandangan Aristoteles tentang penggerak pertama bersifat pasif, hanya memikirkan dirinya sendiri tidak peduli dengan kenyataan dunia. Hal ini tidak sesuai dengan peran Allah yang diyakini oleh agama-agama. Allah

"Aku" Dalam Pancasila (Refleksi Metafisika Pancasila)

sebagai pribadi yang aktif selalu terlibat dalam kehidupan manusia, sehingga pandangan tentang causa prima tidak sesuai dengan keyakinan kaum agamawan di Indonesia.

Notonagoro juga berusaha untuk mencari substansi yang bersifat abstrak-umum-universal. Untuk memperoleh substansi Pancasila menurut Notonagoro dapat dilakukan dengan jalan mengabstraksikan unsur-unsur yang bersifat aksidensial. Dari proses abstraksi tersebut diperoleh substansi Pancasila yaitu terletak pada kata dasarnya: Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, dan Adil. Pandangan Notonagoro yang terlalu menekankan segi substansialistik dan universalistik sebagaimana uraian mengenai inti isi hakikat Pancasila yang abstrak-umum-universal disinyalir oleh Koento Wibisono sudah terlalu usang (Joko Siswanto, 1995: 205).

Driyarkara sebagai seorang filsuf Indonesia yang berbeda dengan Notonagoro juga melakukan refleksi metafisik mengenai Pancasila-melalui pijakan pendekatan antropologi metafisik. Pemikiran Driyarkara banyak dipengaruhi oleh filsuf Merleau-Ponty. Menurut Driyarkara bahwa Pancasila tidak perlu kita cari jauh-jauh, karena keberadaannya sebenarnya melekat secara inheren pada kodrat manusia dalam semesta realita. Jadi barang siapa mengakui keberadaan manusia dia sekaligus mengakui Pancasila.

Dengan merenungkan tentang keberadaan dan hakikat manusia, Driyarkara menyimpulkan rumusan Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat berikut ini:

1. Aku manusia mengakui, bahwa adaku itu merupakan ada bersama dengan cinta kasih (*liebendess Miteinandersein*). Jadi adaku harus aku jalankan sebagai cinta kasih pula, Cinta kasih dalam kesatuanku dengan sesama manusia pada umumnya disebut: PERIKEMANUSIAAN (Sila ke II).
2. PERIKEMANUSIAAN itu harus aku jalankan dalam bersama-sama menciptakan, memiliki, dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat dan perlengkapan hidup untuk menciptakan KEADILAN SOSIAL (Sila ke V).
3. PERIKEMANUSIAAN harus kulakukan juga dalam masyarakat. Aku manusia pasti memasyarakat. Memasyarakat berarti mengadakan kesatuan karya. Agar kesatuan karya itu betul-betul merupakan pelaksanaan dari perikemanusiaan setiap anggota harus dihormati dan diterima sebagai pribadi yang sama haknya. Cara melaksanakan perikemanusiaan dalam sektor ini (ialah pembentukan kesatuan karya) kita sebut: DEMOKRASI. Cara ini dijalankan dengan baik melalui musyawarah untuk mufakat (Sila ke IV).
4. PERIKEMANUSIAAN harus juga kulakukan dalam hubunganku dengan kesatuan, yang dengan proses lambat laun ditimbulkan oleh sejarah, keadaan, tempat, keturunan, kebudayaan, peradaban bersama dan lain-lain faktor. Kesamaan itu ikut serta menentukan dan membentuk diri sebagai manusia yang konkret dengan persaannya, semangatnya,

"Aku" Dalam Pancasila (Refleksi Metafisika Pancasila)

oikirannya dan sebagainya. Ada bersama konkretnya berupa hidup dalam kesatuan itu. Kesatuan yang besar itu dengan melaksanakan Perikemanusiaan, disebut KEBANGSAAN (Sila ke III).

5. Aku mengakui bahwa adaku itu adalah sama, serba terhubung, serba tersokong, serba gantung. Jadi adaku itu tidak sempurna, tidak ada kekuatan sendiri. Jadi aku bukanlah sumber dari adaku. Semua hal yang terbatas, justru karena ada batasnya (sama dengan aku) tidak mungkin merupakan sumber adaku tak mungkin memberi keterangan yang terakhir dari adaku. Yang dengannya merupakan sumber dari adaku pada akhir hanyalah ADA YANG MUTLAK. YANG MAHA ADA. Sang maha ada itu bukanlah sesuatu melainkan Pribadi Yang Maha Sempurna. Itulah Tuhan Yang Maha Esa (Driyarkarya, 1980: 54-55).

Pendekatan yang penulis gunakan dalam tulisan reflektif ini adalah dengan menempatkan eksistensi manusia yang memiliki kesadaran penuh sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dengan itu manusia merasa tak mungkin ada tanpa peran Penciptaan Tuhan, karenanya Tuhan menjadi prinsip pertama dari segala yang ada (termasuk Pancasila). Hal demikian kemudian dijadikan pijakan melakukan pemikiran reflektif metafisis tentang Pancasila. Digunakannya pendekatan melalui ekstensi manusia sebagai makhluk Tuhan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa manusialah sebagai makhluk Tuhan yang dapat berpikir dan mendunia, sehingga hanya manusialah yang melakukan refleksi metafisis

terhadap hal-hal dibalik real maupun yang transenden. Asumsi dasar lainnya adalah bahwa manusialah satu-satunya pendukung maupun pengemban nilai-nilai Pancasila, sehingga hanya manusialah yang ber-Pancasila. Dengan demikian refleksi metafisis tentang Pancasila dapat dilakukan dengan cara antropologi metafisis. Antropologi metafisis adalah metafisika yang bersifat antroposentrik, karena disitu ada hubungan yang erat antara metafisika dengan antropologi. Metafisika merupakan penataan realitas yang dialami manusia dalam eksistensinya. Selain itu manusia sebagai pribadi diberi kesadaran oleh kehadiran nyata yang ada. Jadi, ontologi (metafisika) mempunyai dasar antropologi dan antropologi memuncak pada ontologi. (Lorens Bagus, 1991: 51).

2. Hal Adanya Pancasila

Karl Jaspers (1883-1969) seorang filsuf eksistensial, memberikan pemikiran formal adanya tiga macam konsep yang ada yaitu ada objek, subjek dan ada dalam dirinya sendiri atau ada "an-Sich". Dalam kaitannya dengan eksistensi manusia, maka pertama-tama manusia harus memiliki kesadaran bahwa ia berada dalam situasi yang tidak pasti, karenanya terbuka berbagai kemungkinan. Dalam situasi yang demikian manusia berupaya terus-menerus mencari yang ada hingga didapatkan kepastian akan dirinya (Joko Siswanto, 1998: 128).

Mendasarkan pada pemikiran Karl Jaspers mengenai konsep yang ada,

maka adanya Pancasila dapat dijelaskan berikut ini :

1. Ada-objek atas Pancasila (Pancasila sebagai *genetivus objektivus*) yang berarti bahwa Pancasila ini berhadapan dengan manusia yang bereksistensi. Hal ini berarti pula bahwa aku-manusia menempatkan / meletakkan Pancasila sebagai objek kajian yang harus dipahami secara kritis, teoritis. Dalam kaitan itu harus ada upaya untuk menangkap struktur dan orientasi paling umum / mutlak didalam Pancasila itu sendiri.
2. Ada-subjek atas Pancasila (Pancasila sebagai *genetivus subjektivus*) yang berarti bahwa aku manusia telah memposisikan Pancasila sebagai subjek a priori mutlak, sebagai simbol cakrawala prinsipal. Dalam kaitan ini Pancasila menjadi adanya dalam aku manusia sebagai landasan dalam mencari jawaban atas masalah fundamental tentang hakikat “Ada”.
3. Ada-an sich atas Pancasila yang berarti bahwa adanya Pancasila itu ada dalam dirinya sendiri, yaitu adanya dalam kesatuan rumus dari kelima sila yang termuat di dalamnya. Ada ansich dari Pancasila itu sifatnya tertutup dan tidak menggejala (Bandingkan : Joko Siswanto, 1998: 128)

Manusia sebagai makhluk rasional yang berpikir mampu menanggapi persoalan yang ada di dalam maupun di luar dirinya. Ide-ide ditangkap diolah dan diangkat ke dalam dimensi yang lebih tinggi yang hanya dapat dimengerti oleh manusia yaitu dalam bentuk simbol. Simbol berakar dalam manusia seutuhnya dan dalam kenyataan. (Dibyasuharda, 1990: 240).

Pancasila sebagai rangkaian ide yang terletak dihadapan kita merupakan simbol yang hidup sehingga mengundang untuk dipikirkan. Rangkaian ide bukan merupakan dokma yang kaku, melainkan merupakan suatu tema yang berisikan idea-idea asasi. Istilah yang sering dipakai oleh Driyarkara, Pancasila dapat dipandang sebagai kategori tematis. (Driyarkara, 1990: 66).

Menempatkan Pancasila sebagai kategori tematis mempunyai implikasi bahwa Pancasila dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis. Pengembangan kreatif dan dinamis harus tetap bersumber pada hakikat keberadaan manusia. Heidegger berpendapat bahwa inti adanya manusia terletak dalam eksistensinya. Manusia berada dalam eksistensinya. Manusia berada pada dirinya sendiri dirasakan dan disadari oleh setiap orang. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia selalu berpusat pada kesadaran manusia tentang dirinya, sehingga seluruh hidup dan kehidupannya dialami sebagai bagian dari dirinya. Hal ini dimaksud sebagai dimensi imanensi. Selain itu manusia dapat keluar dari dirinya. Manusia tidak hanya hidup dalam batin saja tetapi yang dirasakan dalam batin itu merupakan yang ada diluar dirinya, yaitu dalam dunia. Dengan demikian manusia mempunyai dimensi yang melampaui dirinya, inilah yang disebut dimensi transendensi. (Theo Huijbers, 1990:51).

Adanya Pancasila sebagai simbol hidup merupakan kristalisasi ide- ide bangsa Indonesia yang ditangkap dan dirumuskan oleh para anggota BPUPKI maupun PPKI.

“Aku” Dalam Pancasila (Refleksi Metafisika Pancasila)

Pancasila sebagai simbol yang hidup di alam bangsa Indonesia, mampu mengarahkan dan menggerakkan eksistensi manusia. Dengan demikian alasan adanya Pancasila yaitu bahwa manusia Indonesia memerlukan simbol hidup yang mengarahkan dan menggerakkan eksistensinya dalam hidup bersama sebagai satu masyarakat dan bangsa dalam satu wadah negara Indonesia. Manusia dalam kenyataan selalu hidup bersama orang lain. Kebersamaan ini nyata dalam seluruh hidup manusia dalam segala tindakannya. Karena itu eksistensi manusia selalu berko-eksistensi, yaitu keluar dari dirinya sendiri kearah sesamanya (Theo Huijbers, 1990:60). Dalam proses pergaulan hidup bersama orang lain, tingkah laku manusia dapat membawa akibat bagi manusia-manusia lainnya. Akibat tingkah laku itu dapat memperkaya kemanusiaan manusia lain, tetapi dapat juga merugikan karena menggerogoti kemanusiaan yang lain. (B. Arif Sidharta, 1989: 256). Agar manusia tidak merugikan kemanusiaan orang lain maka ia harus memberikan hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Kesadaran kemanusiaan memunculkan gagasan untuk berbuat secara adil. Manusia menghayati kemanusiaannya dalam situasi konkrit yaitu hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Perjumpaan dengan orang lain janganlah dipandang sebagai musuh yang akan merendahkan martabat manusia sebagai mana disinyalir oleh Sartre. Bagi Sartre perjumpaan dan pergaulan dengan sesama akan selalu berakhir dengan merendahkan orang lain karena

dijadikan objek. Menjadikan objek artinya menjadikan barang untuk kepentingannya, untuk kesenangannya, untuk kepuasannya sendiri. Itulah yang selalu dituju oleh setiap manusia dalam semua perjumpaannya dengan sesama manusia (Driyarkara, 1978: 84)

3. Paradigma Holistik Pancasila

Paradigma holistik nampaknya lahir sebagai reaksi terhadap paradigma Cartesian–Newtonian yang bersifat atomistik-mekanistik-reduksionistik-deterministik, sehingga realitas dunia tidak dipahami secara bulat dan utuh. Akibat dari itu, kehidupan dan bahkan kesadaran direduksi menjadi gerak-gerak material-mekanistik. Paradigma hoistik diperlukan dalam rangka memandang realitas alam semesta sebagai nexus atau jaringan transformasi energi kreatif yang melahirkan sistem-sistem baru (adaptasi dari Husain Heriyanto, 2003: xiv).

Paradigma holistik-dialogis memperlihatkan tiga karakter utama. *Pertama*, pandangan ontologis yang mendekonstruksi realitas yang padat, beku dan statis menjadi pandangan realitas sebagai suatu sistem jaringan dalam keseluruhan dan proses perubahan menuju kebaruan. *Kedua*, pandangan yang memperlakukan alam semesta sebagai sistem hidup. *Ketiga*, pandangan atau pola pikir realis-pluralis, kritis-konstruktif, sintesis-dialogis (Husain Heriyanto, 2003: 209-212).

Pancasila sebagai sistem filsafat menampilkan ciri atau karakter bahwa rumusan kelima sila yang ada

merupakan sistem jaringan dalam keseluruhan. Artinya masing-masing sila tidak bisa dimaknai sendiri-sendiri secara terpisah satu sama lainnya, masing-masing sila hanya bisa dipahami secara tepat justru dalam relasi atau kontek dengan sila lainnya dalam keseluruhan yang utuh. Pancasila bagi bangsa Indonesia harus dimaknai sebagai simbol hidup yang mampu menjadi penggerak dalam setiap perjuangan menuju cita-cita sebagaimana pula yang digambarkan Pancasila. Pancasila yang memuat lima rumusan sila merupakan sistem filsafat yang mono-pluralis, berarti bahwa kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait, saling memberi makna secara fungsional, sehingga Pancasila hanya bisa dipahami secara lebih tepat melalui pendekatan sintesis-dialogis diantara sila-sila yang ada di dalamnya. Sebagai misal untuk memahami sila Ketuhanan yang maha esa harus diletakan dalam konteks sistesis-dialogis dengan keempat sila lainnya. Ketuhanan yang maha esa dipahami sebagai sesuatu yang dinamis, bukan substansi yang statis dan beku dalam konteks Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, begitu juga untuk sila-sila lainnya.

4. "AKU" Dalam Pancasila

Kesadaran manusia sebagai subjek "**Aku**" dalam sejarah filsafat Barat telah dimulai sejak Socrates (469

– 399 SM). Dalam sejarah pemikiran filsafat pembahasan tentang "aku", "subjek", "kesadaran", "self" mendapat porsi yang cukup penting, dikarenakan dengan "subjek yang berkesadaran" diri manusia akan mampu memahami dan mengatasi dunia, memaknai lingkungan budaya dan kehidupannya, termasuk di dalamnya Pancasila (adaptasi dari Akhyar Yusuf dalam Toeti Heraty Noerhadi, 2013: 263). Kesadaran diri "aku subjek" telah menjadi ciri khas manusia (manusiawi) yang membedakan dengan makhluk yang lain. Disamping itu, manusia dalam pergerakan hidupnya selalu dalam lingkungan budaya, karena manusia berbudaya juga menjadi ciri khas manusiawi.

Istilah **aku** (*self*) menunjukkan "**subjek**" atau sesuatu yang tetap ada sepanjang pengalaman yang berubah-ubah dari kehidupan seseorang. *Aku* (*self*) sesuatu yang melakkan persepsi, konsepsi, memikir, merasa, mennghendaki, mimpi dan menentukan. (Titus, H.dkk,1984:57). Hal demikian menggambarkan adanya kesadaran penuh dari subjek manusia dalam menghadapi hidup dan kehidupannya. "Aku" sebagai seorang subjek manusia senantiasa menyadari identitas pribadiku dengan segenap ciri kekhususanku dan kesadaran mengatasi berbagai hal ataupun persoalan yang melingkupi kehidupanku bersama-sama dengan yang lainnya.

"Aku" oleh Toeti Heraty dibedakan menjadi tiga, yaitu "*aku mitik*", "*aku ontologis*", dan "*aku fungsional*". *Aku mitik* dimaksudkan sebagai subjek manusia yang memiliki sikap merasa dirinya terkepung oleh

"*Aku*" Dalam Pancasila (*Refleksi Metafisika Pancasila*)

kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya. *Aku ontologis* dimaksudkan sebagai subjek manusia yang mampu mengambil jarak dengan lingkungannya, sekaligus merasa bebas untuk meneliti hakikat hal-hal di sekitarnya. *Aku fungsional* dimaksudkan sebagai subjek manusia yang memiliki kesadaran penuh untuk mengadakan relasi-relasi dengan lingkungannya, dan sekaligus memposisikan subjek “aku”-nya dalam spektrum lingkungannya secara tepat, sehingga tidak mengganggu ataupun merugikan “subjek diri” yang lain. (adaptasi dari Toeti Heraty, 2013 : 254).

Makna “aku” dalam kaitan dengan Pancasila, nampaknya lebih tepat mengarah pada “aku ontologis” dan “aku fungsional”. Dikarenakan Pancasila bukan merupakan rangkaian maupun kesatuan rumusan sila-sila yang bersifat mitik, melainkan merupakan rumusan yang rasional dan objektif berdasarkan keadaan dan historisitas bangsa Indonesia. Dengan “aku ontologis” berarti tiap-tiap subjek manusia Indonesia memiliki kesadaran pemikiran mengenai kehadiran dirinya dalam negara yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila, dan akar budaya bangsanya.

Aku manusia Indonesia bila memposisikan Pancasila sebagai objek (*genetivus objektivus*), berarti aku manusia sedang berada di luar dan mengambil jarak dengan Pancasila itu. Secara ontologis (aku-manusia) merupakan makhluk yang memiliki kesadaran akan keterbatasannya. Dengan kondisi demikian meski aku manusia yang berkorelasi dengan

eksistensi yang lain, ia tetap tidak bisa secara menyeluruh dan sempurna mampu menangkap esensi dari adanya Pancasila.

Selanjutnya bila aku manusia memposisikan Pancasila sebagai subjek dalam dirinya (*genetivus subjektivus*), berarti aku-manusia sedang memasukkan Pancasila di dalam eksistensi dirinya, berarti pula ia dan Pancasila sedang menyatu. Hal ini berarti pula bahwa aku-manusia senantiasa berupaya agar tata nilai dalam dirinya, sikap dan tingkah lakunya selaras dengan struktur dan isi dari Pancasila.

Sebagai subjek yang tidak sempurna, manusia tidak berdiri dari dirinya sendiri. Ia berada bersama subjek eksistensi lainnya dan hal lain yang Transenden. Ketidak sempurnaan subjek manusia itu membawa konsekuensi bahwa (aku-manusia) tidak pernah dapat bereksistensi secara total, ia selalu berada dalam bentuk situasi eksistensi tertentu yang terbatas. Menurut Jaspers eksistensi manusia itu berhadapan dengan “situasi batas”. Situasi batas itu antara lain: penderitaan, kegagalan, nasib, dan puncaknya adalah kematian (lihat : Joko Siswanto.1998 : 134-135). Situasi eksistensi yang tertentu dan terbatas itulah yang membawa akibat manusia pada eksistensi gelisah terhadap masa depannya. Kegelisahan itu barulah dapat tenang jika manusia menerima bahwa ada realitas yang menjadi dasar dari segala yang ada, ialah yang disebut dengan Yang Maha Ada. Yang Maha Ada itu satu sebab kalau ada dua atau lebih maka predikat Maha bersifat kontradiksi; Yang Maha Ada itu abadi

sebab bila pernah tidak ada berarti ada yang mengadakan sebelum ia ada. Uraian di atas menggambarkan bahwa asumsi dasar Pancasila mengandaikan adanya nilai humanisme yang integral. Struktur kenyataan dalam Pancasila berpusat pada eksistensi manusia. Dunia infra –human diartikan dan diakui nilainya dalam hubungannya dengan manusia. Bersama dengan itu, manusia dalam strukturnya terbuka bagi dimensi transenden dan menunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Anton Bakker, 1987: 78). Situasi Batas yang melingkupi eksistensi (aku-manusia) dalam konteks aku dalam Pancasila dan sekaligus Pancasila dalam eksistensiku, secara ontologis telah membawa Pancasila sebagai simbol hidup yang mengarahkan dan mempengaruhi situasi eksistensi manusia, baik subjek eksistensi yang mandiri maupun subjek eksistensi yang bersifat dan bersama-sama dengan subjek eksistensi yang lainnya.

Pertemuan antar aku dengan sesama yang terjadi dalam ruang dan waktu tertentu dinamakan masyarakat. Masyarakat yang terorganisir dan bersatu karena kesamaan nasib, pertalian darah, wilayah, dapat terbentuk suatu bangsa. Timbulnya kesadaran akan bangsa atau nasionalisme adalah penghayatan sila kemanusiaan dalam lingkungan, kebudayaan, serta nasib bersama dan untuk kepentingan bersama. Nasionalisme tidak bersifat eksklusif, tetapi harus dijalankan dalam rangka internasionalisme yang pada hakekatnya mengakui bahwa seluruh umat manusia adalah sama (Soerjanto Puspwardojo, 1989: 70)

D. KESIMPULAN

Pendekatan dalam melakukan refleksi metafisik atas Pancasila dapat menggunakan pijakan dasar pada eksistensi manusia yang memiliki kesadaran penuh sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dengan itu manusia merasa tak mungkin ada tanpa peran Penciptaan Tuhan, dengan asumsi dasar bahwa hanya manusia yang bereksistensi yang dapat berpikir dan mendunia, sehingga hanya manusia yang bereksistensi itulah yang dapat melakukan refleksi metafisik terhadap hal-hal yang ada dibalik yang real maupun yang transenden (termasuk didalamnya hal adanya Pancasila). Disamping itu juga dilandasi adanya titik temu antara metafisika dan Pancasila yang terletak pada eksistensi manusia. Eksistensi aku-manusia Indonesia pada aku dalam Pancasila, berada dalam bentuk humanis-me yang integral yang menempatkan relasi aku-manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia dan dengan Tuhannya secara serasi, selaras dan seimbang. Disini Pancasila menempatkan manusia Indonesia sebagai subjek monopluralis.

Refleksi metafisik terhadap Pancasila agar bisa dipahami dan dihayati secara utuh, menyeluruh dan komprehensif bisa dilakukan dengan pendekatan holistik-dialogis. Melalui pendekatan holistik-dialogis, diperoleh pemahaman bahwa Pancasila itu merupakan satu sistem filsafat yang mono pluralis.

Adanya Pancasila merupakan simbol hidup yang mempengaruhi

"Aku" Dalam Pancasila (Refleksi Metafisika Pancasila)

mengarahkan dan menggerakkan eksistensi manusia Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan adanya Pancasila. Adanya Pancasila yang ditangkap terpisah dengan diri manusia, merupakan “*genetivus objektivus*”. Sedangkan adanya Pancasila yang ditangkap secara menyatu/ melebur dengan diri manusia, dianggap sebagai “*genetivus subjektivus*”.

Aku dalam Pancasila dan sekaligus pula Pancasila dalam eksistensiku, secara ontologis telah memosisikan Pancasila sebagai “simbol hidup” yang mengarahkan dan menggerakkan situasi dan kondisi eksistensi manusia Indonesia sebagai subjek yang monopluralis. Pancasila sebagai simbol hidup yang dianggap “melepaskan” manusia Indonesia dari situasi-situasi batas yang melingkupi eksistensinya. Pancasila sebagai simbol hidup memerlukan penjabaran pada tataran kategori operasional yang nilai-nilainya tidak terlepas dari nilai-nilai dasarnya yang bersifat imanen.

Konsekuensi logis implementasinya bahwa manusia Indonesia sebagai makhluk monopluralis dengan segala potensi internal maupun eksternalnya, harus berupaya terus menerus menggali nilai-nilai implementatif dari nilai-nilai dasar ontologis Pancasila, sehingga Pancasila tidak dirasakan semakin kabur dan kering dari kehidupan sehari-hari masyarakat manusia Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Lorens, 1991, *Metafisika*, Gramedia, Jakarta.
- Bakker, Anton, 1987, “Ilmu-Ilmu Sosial menempatkan Manusia Sebagai Subjek” dalam *Pancasila Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*, B.P. Kedailatan Rakyat, Yogyakarta.
- Bakker, Anton, 1992, *Ontologi Metafisika Umum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bakker, Anton, 2000, *Antopologi Metafisik*, Kanisius, Yogyakarta
- Breda, R.L., *Metaphysics*, Penguin Books, London.
- Darmaputra, Eka, 1992, *Pancasila Identitas dan Modernitas*, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Dibyasuharda, 1990, *Dimensi Metafisik Dalam Simbol*, Disertasi S.3 Fak. Filsafat UGM.
- Driyarkara, N., 1978. *Percikan Filsafat*, Pt. Pembangunan, Jakarta.
- Driyarkara, N., 1980, *Driyarkara Tentang Negara dan Bangsa*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hadi, Hardono, P., 1994, *Hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hamersma, Harry, 1985, *Filsafat Eksistensi Karls Jaspers*, Gramedia, Jakarta.

- Huijbers, Theo, 1990. *Filsafat Hukum*, Kanisius. Yogyakarta. *Madzab dan Refleksinya*, Remaja Karya, Bandung.
- Jaspers, Karl, 1969, *Philosophy I*, The University of Chicago Press, Chicago and London.
- Merleau-Ponty, M., 1965, *Phenomenology of Perception*, translated by Colin Smith, The Humanities Press, 2nd Impression, New York.
- Merleau-Ponty, M., 1967, *The Structure of Behavior*, translated by Alan L. Fischer, Beacon Press Boston.
- Noerhadi, Toeti Heraty, 2013, *Aku dalam Budaya*, Gramedia, Jakarta.
- Notonagoro, 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Jakarta.
- Notonagoro, 1974, *Pancasila Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia*, Pantjuran Tujuh, Jakarta.
- Pranaka, A.M.W., 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1989, *Filsafat Pancasila- Sebuah Pendekatan Sosio Budaya*, Gramedia, Jakarta.
- Sidharta, Arif, 1989, "Aspek Ontologi Dalam Filsafat Hukum" dalam *Filsafat Hukum*
- Siswanto, Joko, 1995, *Metafisika Substansi*, Tesis S.2, Fakultas Filsafat UGM.
- Siswanto, Joko, 1998. *Sistem- Sistem Metafisika Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siswanto, Joko, 2004, *Metafisika Sistematis*, Taman Pustaka Kristen, Yogyakarta.
- Siswanto, Joko dan Reno Wikandaru, 2013, *Metafisika Nusantara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sontag, Friederick, 1970, *Problems of Metaphysics*, Chandler Publishing Company, Pennsylvania.
- Sunoto, 1984, *Filsafat Pancasila pendekatan melalui Metafisika-Logika-Etika*, Hanindita, Yogyakarta.
- *) Drs. Supriyono Purwosaputro, M.Hum, Dosen Program Studi PPKn – FPIPS-KR Universitas PGRI Semarang. Saat ini masih menempuh studi doktoral Ilmu Filsafat UGM